



**EVALUASI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2022**

TRIWULAN I

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS
2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Kudus untuk kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2022, yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 dengan mengakomodasi perubahan aturan, dinamika kebutuhan masyarakat, peningkatan pelayanan publik dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Provinsi.

Sesuai dengan Pasal 181 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diatur bahwa Bupati/Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota. Selanjutnya dalam Pasal 183 diatur bahwa, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah. Pada Pasal 277 diatur bahwa, Kepala Bappeda kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Kepala Bappeda kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Mendasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan sampai dengan triwulan I Tahun 2022, percepatan pencapaian target pembangunan daerah maupun nasional Tahun 2022, percepatan pembangunan di segala bidang berlandaskan keunggulan kompetitif, dengan prioritas Peningkatan kondusivitas, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan toleransi, Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Di samping hal tersebut, evaluasi RKPD Tahun 2022 juga memuat permasalahan dan analisisnya serta rekomendasi untuk bisa dijadikan dasar dalam penyusunan RKPD yang akan datang.

1.2 Maksud dan Tujuan

- (a) Maksud dari evaluasi RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 adalah untuk memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan RKPD tahun 2022 dan mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKPD.
- (b) Tujuan dari evaluasi RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 adalah merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut sebagai masukan dalam penyusunan RKPD tahun berikutnya

1.3 Manfaat

Hasil evaluasi RKPD Tahun 2022 dapat digunakan sebagai :

- (a) Bahan penyusunan RKPD untuk periode selanjutnya;
- (b) Indikator penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (c) Indikator penilaian kinerja Perangkat Daerah; dan
- (d) Bahan penilaian pencapaian rencana aksi program dan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional

I.4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022

RKPD Kabupaten Kudus tahun 2022, disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD. Pada saat ini, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023 telah ditetapkan, sehingga menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Secara umum, prioritas dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RKPD 2022 selaras dengan RPJMD dengan rincian sebagaimana Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2022

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2022 Kabupaten Kudus	Sasaran Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2022	Sasaran Pembangunan Daerah dalam RPJMD Tahun 2018-2023
1	2	3	4
1	Peningkatan kondusivitas, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan toleransi	- Meningkatnya Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Toleransi Umat Beragama	- Meningkatnya Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Toleransi Umat Beragama
2	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	- Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan wilayah - Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	- Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan wilayah - Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah
3	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	- Meningkatnya Keseimbangan Pemanfaatan Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan	- Meningkatnya Keseimbangan Pemanfaatan Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan
4	Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	- Meningkatnya Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat - Meningkatnya Kemampuan Konsumsi Masyarakat - Meningkatnya Kualitas Pendidikan - Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	- Meningkatnya Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat - Meningkatnya Kemampuan Konsumsi Masyarakat - Meningkatnya Kualitas Pendidikan - Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
5	Pemantapan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	- Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi - Meningkatnya Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Toleransi Umat Beragama	- Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi - Meningkatnya Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Toleransi Umat Beragama

1.5. Sistematika Dokumen Evaluasi RKPD

Sistematika Evaluasi RKPD ini disusun terdiri dari enam bab dengan rincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan latar belakang dan alasan yang mendasari penyusunan evaluasi RKPD Tahun 2022.

1.2 Maksud dan Tujuan

Mengemukakan maksud dan tujuan dari penyusunan evaluasi RKPD Tahun 2022.

1.3 Manfaat

Memberikan uraian ringkas tentang kegunaan Evaluasi RKPD Tahun 2022.

1.4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022

Menjelaskan sinkronisasi prioritas dan sasaran yang termuat dalam RKPD 2022 terhadap prioritas dan sasaran yang termuat dalam RPJMD 2018-2023 dan sinkronisasi dukungan daerah terhadap prioritas nasional.

1.5 Sistematika Dokumen Evaluasi RKPD

Mengemukakan sistematika Evaluasi RKPD terkait dengan pengaturan serta penjelasan ringkas isi dari setiap bab.

BAB II KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH DAN TAHUNAN KABUPATEN KUDUS

Menjelaskan kebijakan arah kebijakan pembangunan lima tahunan dan fokus tahun 2022.

BAB III EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD 2022 memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD 2022 sampai Triwulan I baik fisik maupun keuangan dibandingkan target RKPD.

BAB IV ANALISIS DAN PERMASALAHAN

Mengemukakan penjelasan deviasi antara implementasi perencanaan kegiatan tahunan yang tertuang dalam APBD dengan RKPD dan implementasi perencanaan program yang tertuang dalam RKPD dengan RPJMD. Di samping itu juga dijelaskan adanya permasalahan spesifik yang mengakibatkan APBD berbeda kedalamannya dengan RKPD.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB VI PENUTUP

BAB II

KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH DAN TAHUNAN KABUPATEN KUDUS

2.1 Kebijakan Jangka Menengah Tahun 2018-2023

Visi dan Misi pembangunan daerah tahun 2018–2023 Kabupaten Kudus perlu dituangkan ke dalam kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Kudus. Kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Kudus tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Kebijakan umum yang terkait dengan mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia.

Untuk mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia dilaksanakan melalui program prioritas antara lain mewujudkan industri kerakyatan, pendidikan, kesehatan, gender, pemuda dan olahraga serta kesejahteraan sosial. Penggunaan dan penguasaan teknologi dan multimedia di era globalisasi menjadi basis dalam perkembangan daerah. Dengan adanya pemanfaatan yang baik teknologi dan multimedia diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang berkualitas, kreatif dan inovatif. Terbentuknya masyarakat yang berkualitas, kreatif dan inovatif diharapkan mampu mewujudkan perubahan – perubahan sebagai langkah awal perkembangan daerah yang lebih baik.

Sasaran yang akan dicapai adalah dengan pendidikan dan pelatihan teknologi dan multimedia bagi masyarakat terutama bagi generasi – generasi muda daerah. Hal ini perlu didukung dengan pengembangan penelitian, pengkajian serta inovasi secara terarah. Peta jalan Sistem Inovasi Daerah (*roadmap* SIDA) perlu disusun untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah agar dapat mengembangkan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan inovasi daerah serta kreativitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi inovasi, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang berkualitas, kreatif dan inovatif.

2. Kebijakan umum yang terkait dengan mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.

Guna mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik dilaksanakan dengan program prioritas yang menyangkut transparansi anggaran, akuntabilitas, manajemen pemerintahan yang modern dan pelayanan publik. Upaya peningkatan pelayanan publik dimaksudkan guna memberikan pelayanan publik yang bermutu untuk seluruh masyarakat. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas

barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik yang dimaksud termasuk pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, lingkungan hidup, komunikasi dan informasi, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dibutuhkan pemerintahan yang semakin handal. Keberhasilan mewujudkan pemerintah yang handal tergantung kepada sumber daya manusia yang tersedia. Sasaran utamanya adalah peningkatan kinerja SDM. Peningkatan kinerja SDM dilakukan dengan cara pendidikan dan pelatihan dengan harapan mampu memperbaiki manajemen pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik, untuk melayani kepentingan masyarakat.

3. Kebijakan umum yang terkait dengan mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif.

Dalam rangka mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif, diprioritaskan pada pendidikan karakter, berbagi sesama dan saling menghormati. Upaya mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif dilaksanakan guna menciptakan daerah tanpa terjadi adanya kekerasan. Perwujudan kehidupan yang toleran dan kondusif dapat dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan seperti adanya toleransi antar agama dengan kebebasan beragama, toleransi terhadap perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Hubungan baik, saling menghargai dan menghormati dalam bermasyarakat merupakan beberapa sasaran yang dapat dilakukan. Disamping itu, juga diupayakan adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjalin toleransi serta harmonisasi sekaligus perlu adanya perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia .

4. Kebijakan umum yang terkait dengan memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing.

Untuk memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing dilaksanakan melalui program prioritas akselerasi daya saing, pemberdayaan ekonomi lokal dan program produksi yang kreatif dengan membentuk sentra industri kecil. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui keunggulan lokal dan pembangunan iklim usaha yang berdaya saing menjadi prioritas mengingat peran yang sangat penting dalam penyerapan tenaga kerja yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Sasaran yang dilakukan dengan peningkatan aktivitas perdagangan, jasa, agribisnis dan pariwisata, peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan terkait SDM,

permodalan dan investasi serta akses terhadap produk yang akan dipasarkan dengan perbaikan prasarana dan sarana pendukung. Dengan memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal maka perekonomian akan semakin tumbuh dan berkembang. Berbagai permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya penguasaan teknologi dan informasi bagi masyarakat. Dengan demikian perlu adanya optimalisasi pemerintah sebagai penyedia (*provider*) menjadi regulator, fasilitator, motivator dan katalisator berbagai kegiatan ekonomi kerakyatan yang diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan yang merata.

Selain keempat hal tersebut diatas terdapat pilar penting yang perlu diprioritaskan dalam proses pembangunan di Kabupaten Kudus, yang dikenal dengan 9 (sembilan) Program Unggulan yaitu :

1. Tunjangan 1 juta per bulan untuk semua guru non PNS di PAUD/TK/Madin/RA/TPQ/SD/SMP/SMA/Madrasah
2. Bantuan sosial santunan bagi warga yang sakit di rumah sakit kelas 3 dan santunan anak yatim piatu serta santunan kematian cair dalam satu hari lewat desa
3. Pelatihan dan pendampingan 500 wirausahawan baru setiap tahun
4. Bantuan per bulan untuk khotib dan imam masjid/mushola serta semua pemuka agama/semua tempat ibadah
5. Pendampingan dan pemberdayaan petani melalui inovasi bibit serta penguatan pemasaran hasil panen
6. Pemberdayaan ekonomi dan usaha warga melalui penyaluran bantuan usaha
7. Pembinaan olahraga, seni budaya dan komunitas kreatif untuk peningkatan sumberdaya manusia
8. Perlindungan dan pemberdayaan perempuan, kepala keluarga melalui pelatihan khusus kewirausahaan
9. Pemberdayaan buruh melalui forum komunikasi Pimpinan Unit Kerja (PUK)/Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB), perusahaan dan pemerintahan daerah.

2.2 Kebijakan Tahunan Tahun 2022

Pada tahun 2022 untuk mewujudkan visi “Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera”, fokus pembangunan diarahkan pada Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan didukung kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan nyaman, dengan prioritas antara lain : Peningkatan kondusivitas, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan toleransi, pengembangan pusat pertumbuhan wilayah, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Prioritas pembangunan tersebut merupakan

upaya Kabupaten Kudus dalam mencapai target sasaran tahun 2022 yang meliputi :

1. Kemiskinan sebesar 6,5 – 6,10%.
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 2,5 – 3,14%.
3. Inflasi sebesar $2,5 \pm 1\%$.
4. PDRB/Kapita sebesar 145 – 150 juta/orang.
5. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,5 – 3.05%.
6. IPM sebesar 75,5 – 76,44.

BAB III
EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022

3.1 Hasil Evaluasi RKPD

Evaluasi kinerja pembangunan Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada tingkat pencapaian realisasi sampai dengan Triwulan I berdasarkan target sasaran tahun 2022. Kinerja tingkat pencapaian realisasi kegiatan dan program ini diukur berdasarkan tingkat pencapaian *output/outcome* kegiatan dan tingkat pencapaian realisasi keuangan. Penilaian masing-masing kinerja tingkat pencapaian realisasi dilakukan untuk masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Di dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, pada tahun 2022 tercantum 151 program. Di dalam RKPD Tahun 2022 tercantum 126 program dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 1.814.077.402.930.-.

Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus pada tahun 2022 ini menyelenggarakan urusan pemerintahan pada APBD tahun 2022 sebanyak 127 program dengan 242 kegiatan. Sedangkan pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022, jumlah program dan kegiatan yang direncanakan sebanyak 126 program dengan 240 kegiatan. Perbedaan pada program dan kegiatan di RKPD dan APBD disebabkan :

1. Kegiatan DAK Sanitasi.
2. Penerapan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Perumahan Rakyat sesuai Berita Acara Penerapan SPM Perumahan Rakyat Tahun 2020 dan Pengintegrasian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2022 pada tanggal 19 Agustus 2021.

Berikut adalah Program yang ada di APBD Tahun 2022 tetapi tidak ada di RKPD Tahun 2022.

1. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Sedangkan kegiatan yang ada di APBD Tahun 2022 tetapi tidak ada di RKPD Tahun 2022, sebagai berikut :

1. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.

3.2 Tingkat Capaian Kinerja

Berdasarkan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah diperoleh rata-rata tingkat pencapaian kinerja sebesar 28,50 persen dengan predikat sangat tinggi. Gambaran tingkat pencapaian anggaran rata-rata sampai dengan Triwulan I tahun 2022 untuk masing-masing Perangkat Daerah adalah :

Tabel 3.2
Tingkat Capaian Kinerja Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022
Triwulan I

No	NAMA OPD / SUB OPD	Rata - rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD (%)
1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	9,16
2	DINAS KESEHATAN	16,62
3	UPT PUSKESMAS KALIWUNGU	25,28
4	UPT PUSKESMAS SIDOREKSO	33,04
5	UPT PUSKESMAS WERGU WETAN	19,31
6	UPT PUSKESMAS PURWOSARI	14,33
7	UPT PUSKESMAS RENDENG	16,7
8	UPT PUSKESMAS JATI	41,55
9	UPT PUSKESMAS NGEMBAL KULON	23,74
10	UPT PUSKESMAS UNDAAN	20,32
11	UPT PUSKESMAS NGEMPLAK	32,73
12	UPT PUSKESMAS MEJOBLO	21,76
13	UPT PUSKESMAS JEPANG	33,97
14	UPT PUSKESMAS JEKULO	26,94
15	UPT PUSKESMAS TANJUNGREJO	30,2
16	UPT PUSKESMAS BAE	18,6
17	UPT PUSKESMAS DERSALAM	22,89
18	UPT PUSKESMAS GRIBIG	32,98
19	UPT PUSKESMAS GONDOSARI	13,14
20	UPT PUSKESMAS DAWE	23,72
21	UPT PUSKESMAS REJOSARI	23,57
22	UPTD Laboratorium Kesehatan	4,52
23	RSUD DR. LOEKMONO HADI	19,82
24	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	31,65
25	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	37,26
26	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	46,43
27	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	15,85
28	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	17,54
29	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	11,17
30	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	35,83

No	NAMA OPD / SUB OPD	Rata - rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD (%)
31	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	17,03
32	DINAS PERHUBUNGAN	19,11
33	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	39,26
34	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	19,88
35	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	12,89
36	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	46,74
37	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	11,41
38	DINAS PERDAGANGAN	28,28
39	BAGIAN PEMERINTAHAN	45,81
40	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	29,14
41	BAGIAN HUKUM	44,05
42	BAGIAN PEREKONOMIAN	39,82
43	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	44,39
44	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	36,01
45	BAGIAN UMUM	52,19
46	BAGIAN ORGANISASI	34,87
47	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	27,5
48	SEKRETARIAT DPRD	23,32
49	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	45,97
50	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	19,25
51	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	15,1
52	INSPEKTORAT DAERAH	24,15
53	KECAMATAN KALIWUNGU	29,97
54	KECAMATAN KOTA KUDUS	29,41
55	KELURAHAN PURWOSARI	35,44
56	KELURAHAN SUNGGINGAN	33,54
57	KELURAHAN PANJUNAN	21,34
58	KELURAHAN WERGU WETAN	31,99
59	KELURAHAN WERGU KULON	31,49
60	KELURAHAN MLATI KIDUL	35,82
61	KELURAHAN MLATINOROWITO	20,64
62	KELURAHAN KERJASAN	49,65
63	KELURAHAN KAJEKSAN	35,27
64	KECAMATAN JATI	27,73
65	KECAMATAN UNDAAN	52,54
66	KECAMATAN MEJOBLO	30,03
67	KECAMATAN JEKULO	22,21
68	KECAMATAN BAE	37,35
69	KECAMATAN GEBOG	44,14
70	KECAMATAN DAWE	25,61
71	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	32,69
	RATA - RATA CAPAIAN KINERJA	28,50

Adapun data rincian evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran.

BAB IV
ANALISIS DAN PERMASALAHAN

4.1 ANALISIS

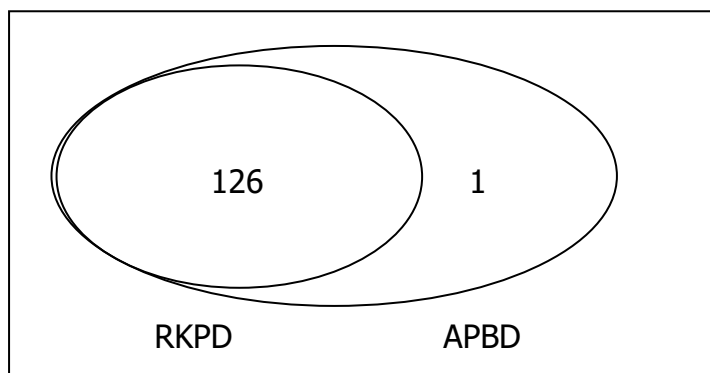
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD, RKPD dan APBD, dapat dilakukan analisis bahwa terdapat perbedaan antara target kinerja RKPD dengan RPJMD (belum sinkron dan konsisten) serta terdapat kegiatan yang tidak direncanakan akan tetapi dianggarkan dalam mekanisme APBD dan kadang kurang sinkron dengan dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD).

Sinkronisasi program/kegiatan dalam RPJMD, RKPD dan APBD Kabupaten Kudus Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Sinkronisasi Program/Kegiatan dalam
RKPD dan APBD Kabupaten Kudus Tahun 2022

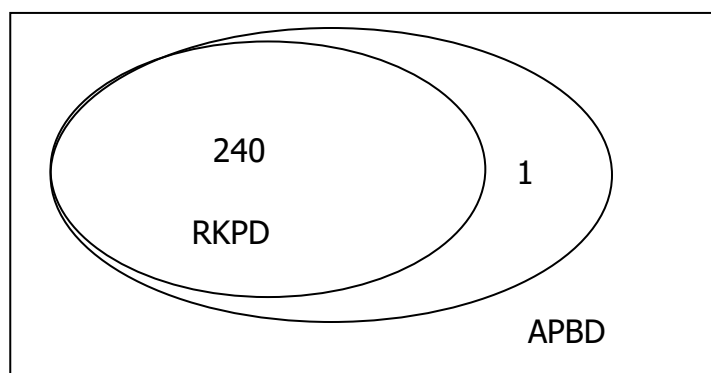
	Jumlah Program/ Kegiatan dalam RKPD	Jumlah Program/ Kegiatan dalam APBD	Program/ Kegiatan APBD yang sama dengan dengan RKPD	Program/ Kegiatan APBD di luar RKPD (Tidak Tercantum dalam RKPD)	Program/ Kegiatan ada di RKPD namun tidak dianggarkan di APBD
Kegiatan	240	242	240	2	0
Program	126	127	126	1	0

Apabila dibuat irisan dari program dan kegiatan yang tercantum di RKPD dengan APBD, jumlah program RKPD yang terakomodir di APBD sebesar 100 % (126 program). Adapun penambahan program baru pada APBD sebanyak 1 program atau 0,79 %.



Gambar 4.1 Irisan Program RKPD dengan APBD Tahun 2022

Jumlah kegiatan yang terakomodir dari RKPD ke APBD sebanyak 240 kegiatan atau 100%. Dan Jumlah kegiatan APBD yang berasal dari RKPD sebesar 100% dengan penambahan kegiatan baru di APBD sebanyak 2 kegiatan atau 0,83 % dari total jumlah kegiatan di APBD.



Gambar 4.2 Irisan Kegiatan RKPD dengan APBD Tahun 2022

Kriteria penilaian kinerja pada masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Triwulan I adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Kriteria Penilaian Kinerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Kudus Tahun 2022

No.	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Interval Nilai Realisasi s/d Triwulan I	Jumlah Perangkat Daerah
1	Sangat Tinggi	$\geq 23\%$	46
2	Tinggi	19 % < 23%	11
3	Sedang	17 % < 19 %	3
4	Rendah	13 % < 17 %	6
5	Sangat Rendah	< 12 %	5

Berdasarkan rata-rata kriteria penilaian evaluasi kinerja maka status kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Triwulan I adalah “Sangat Tinggi”. Sebanyak 71 Perangkat Daerah dan Unit Perangkat Daerah atau 84,51% termasuk dalam kategori sedang, tinggi dan sangat tinggi. Sedangkan 11 Perangkat Daerah dan Unit Perangkat Daerah atau 15,49% masuk dalam kategori rendah dan sangat rendah yaitu :

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
2. Dinas Kesehatan;
3. UPT Puskesmas Purwosari;
4. UPT Puskesmas Rendeng;
5. UPT Puskesmas Gondosari;
6. UPTD Laboratorium Kesehatan;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
10. Dinas Pertanian dan Pangan; dan
11. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

4.2 Permasalahan

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan APBD sehingga realisasi kinerja dan penyerapan anggarannya kurang baik antara lain :

- DPA DBHCHT belum ditetapkan karena adanya perubahan regulasi sehingga kegiatan yang dibiayai DBHCHT baru dapat dilaksanakan pada Triwulan 2;
- Kegiatan yang bersifat kontraktual banyak yang masih dalam proses pengadaan lelang;
- Karena adanya kegiatan yang belum dimulai atau belum proses kontrak;
- Kendala masih kecilnya capaian fisik maupun keuangan dikarenakan Juknis DAK yang terbit terlambat dan kebanyakan kegiatan fisik yang masih dalam tahap perencanaan

Solusi yang dapat diambil atas permasalahan yang ada antara lain:

- Peningkatan atau percepatan manajemen pelaksanaan kegiatan dan pelaporan terutama dalam penyelesaian laporan pertanggungjawaban kegiatan;
- Lebih meningkatkan capaian kinerja dan meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam melaksanakan program dan kegiatan.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penyusunan dokumen ini mempunyai tujuan untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional. Tujuan ini dicapai melalui serangkaian proses identifikasi terhadap serapan dana APBD dan realisasi capaian target yang direncanakan dalam DPA, serta faktor yang menyebabkan kegiatan belum dapat dilaksanakan hingga Triwulan I.

Hasil evaluasi RKPD Triwulan I, secara umum menunjukkan perkembangan realisasi terkait fisik dan keuangan. Adapun beberapa kesimpulan utama dari evaluasi ini diantaranya :

- 1) Rata-rata kegiatan pembangunan ataupun pengadaan barang baru melalui proses lelang sehingga pada Triwulan I capaian masih kecil. Hal ini dikarenakan regulasi yang belum final, sehingga adanya penundaan dalam proses pelaksanaan kegiatan. Juga pekerjaan yang melibatkan pihak ketiga dalam proses pelaksanaan kegiatan masih pada proses pengadaan barang dan jasa.
- 2) Percepatan rewiu HPS oleh inspektorat agar Perangkat Daerah dapat melaksanakan kegiatan – kegiatan yang melibatkan pihak ketiga.

Berdasarkan evaluasi RKPD Tahun 2022, maka rekomendasi yang dapat dilaksanakan antara lain :

- 1) Melakukan kajian ulang tentang pelaksanaan kegiatan yang melibatkan banyak peserta agar kegiatan tersebut dapat terlaksana.
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait untuk pelaksanaan kegiatan yang belum dilaksanakan.

Secara rinci hasil evaluasi dan rekomendasi Perangkat Daerah sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 5.1 Kesimpulan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022

No	NAMA OPD / SUB OPD	Rata - rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD	Rata - rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tindak Lanjut untuk Triwulan Berikutnya	Tindak Lanjut untuk Tahun Berikutnya
1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	9,16	Sangat Rendah	9,74	Sangat Rendah	Banyak kegiatan yang masih menunggu/Menyesuaikan jadwal dari Pemerintah Provinsi Maupun Pusat sehingga pada TW I ini belum terlaksana dengan maksimal	Kerjasama antar bidang dan Pihak yang terkait.	Pencapaian kinerja dan realisasi anggaran TW I masih dibawah target yang direncanakan, untuk TW II agar ditingkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran terutama untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terkait dengan jadwal pemerintah pusat maupun provinsi demi tercapainya target kinerja dan realisasi anggaran TW II.	Jadwal pelaksanaan kegiatan supaya direncanakan dengan cermat agar capaian kinerja dan realisasi anggaran dapat mencapai hasil maksimal.
2	DINAS KESEHATAN	16,62	Rendah	10,34	Sangat Rendah	Kegiatan yang bersumber anggaran dari DBHCHT belum bisa dilaksanakan karena menunggu penetapan hasil desk/ verifikasi sesuai dengan PMK 215/PMK.07/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya SDM yang mencukupi; - Penetapan anggaran termasuk DAK pada awal tahun; - Tim yang memadai pada masing-masing subkoordinator. 	Tingkatkan kinerja dan segera laksanakan kegiatan yang bersumber anggaran dari DBHCHT setelah DPA ditetapkan agar target semester 1 dapat tercapai	Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan

3	UPT PUSKESMAS KALIWUNGU	25,28	Sangat Tinggi	13,16	Rendah	DPA DBHCHT Belum ditetapkan karena adanya perubahan regulasi sehingga kegiatan yang dibiayai DBHCHT baru dapat dilaksanakan Triwulan II	Tersedianya SDM yang mencukupi, penetapan anggaran termasuk DAK pada Awal Tahun	Tingkatkan kinerja dan segera laksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari DBHCHT agar target semester 1 dapat tercapai	Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan
4	UPT PUSKESMAS SIDOREKSO	33,04	Sangat Tinggi	13,82	Rendah	DPA DBHCHT belum ditetapkan karena adanya perubahan regulasi sehingga kegiatan DBHCHT baru dapat dilaksanakan pada Triwulan II	Tersedianya SDM yang mencukupi , Penetapan anggaran termasuk DAK BOK pada awal tahun	Meningkatkan kinerja dalam pelayanan masyarakat dan segera melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari anggaran DBHCHT setelah DPA ditetapkan sehingga target semester 1 dapat tercapai	Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan
5	UPT PUSKESMAS WERGU WETAN	19,31	Tinggi	14,14	Rendah	DPA DBHCHT belum ditetapkan karena adanya perubahan regulasi sehingga kegiatan yang dibiayai DBHCHT baru dapat dilaksanakan Triwulan II	DAK Non Fisik ditetapkan bersamaan APBD murni sehingga bisa dimulai diawal tahun	Meningkatkan kinerja dalam pelayanan masyarakat dan segera melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari sumber anggaran DBHCHT setelah DPA ditetapkan sehingga target semester 1 dapat tercapai	Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan

6	UPT PUSKESMAS PURWOSARI	14,33	Rendah	13,16	Rendah	DPA DAK-BOK baru dilaksanakan pada Triwulan II, DPA DBHCHT belum ditetapkan karena ada perubahan regulasi sehingga kegiatan yang dibiayai DBHCHT baru dapat dilaksanakan pada Triwulan II	Tersedianya SDM yang mencukupi dalam pelaksanaan kegiatan	Tingkatkan kinerja, dan segera laksanakan kegiatan yang anggarannya bersumber dari DAK BOK dan DBHCHT setelah DPA DBHCHT ditetapkan agar target semester 1 bisa tercapai	Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan
7	UPT PUSKESMAS RENDENG	16,7	Rendah	12,92	Sangat Rendah	DPA DBHCHT Belum ditetapkan karena adanya perubahan regulasi sehingga kegiatan yang dibiayai DBHCHT baru dapat dilaksanakan Triwulan II	Tersedianya SDM yang mencukupi, penetapan anggaran termasuk DAK pada Awal Tahun	Tingkatkan kinerja dan segera laksanakan kegiatan yang bersumber anggaran dari DBHCHT setelah DPA ditetapkan agar target semester 1 bisa tercapai	kegiatan yang telah direncanakan bisa dilaksanakan sesuai target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan
8	UPT PUSKESMAS JATI	41,55	Sangat Tinggi	15,85	Rendah	DPA DBHCHT belum ditetapkan karena adanya perubahan regulasi sehingga kegiatan yang dibiayai DBHCHT baru dapat dilaksanakan Triwulan II	DAK Non Fisik ditetapkan bersamaan APBD murni sehingga bisa dimulai diawal tahun	Tingkatkan kinerja dalam melayani masyarakat dan segera laksanakan kegiatan yang dibiayai anggaran bersumber dari DBHCHT setelah DPA ditetapkan sehingga target semester 1 dapat tercapai	Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan
9	UPT PUSKESMAS NGEMBAL KULON	23,74	Sangat Tinggi	13,14	Rendah	DPA DBHCHT belum ditetapkan karena adanya perubahan regulasi sehingga kegiatan yang dibiayai DBHCHT baru dapat dilaksanakan Triwulan II	Penetapan Anggaran termasuk DAK pada awal Tahun	Tingkatkan kinerja dan segera laksanakan kegiatan yang anggaran bersumber dari DBHCHT setelah DPA ditetapkan agar target kinerja semester 1 dapat tercapai	Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan

10	UPT PUSKESMAS UNDAAN	20,32	Tinggi	15,63	Rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan dalam mencegah penyakit - Waktu yang bersamaan dengan aktivitas kerja - Tidak adanya anggota keluarga yang bisa mendampingi saat pemeriksaan, baik lansia, balita, ibu hamil - Belum ditetapkannya DPA DBHCHT 	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana prasarana yang cukup - Tenaga yang diatur sedemikian rupa, walaupun memang terasa kurang (dimaksimalkan) - Dana yang tersedia cukup memadai 	Perlunya peningkatan kegiatan KIE untuk peningkatan kesadaran masyarakat kesehatan dan segera laksanakan kegiatan yang anggaran bersumber dari DBHCHT setelah DPA ditetapkan agar target kinerja semester 1 dapat tercapai	Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan
11	UPT PUSKESMAS NGEMPLAK	32,73	Sangat Tinggi	17,71	Sedang	DPA DBHCHT TA 2022 belum ditetapkan karena adanya perubahan regulasi sehingga kegiatan yang dibiayai anggaran DBHCHT belum bisa dilaksanakan Rencana kegiatan dari anggaran DBHCHT dilaksanakan pada Triwulan II	Anggaran DAK Non Fisik BOK ditetapkan bersamaan APBD murni sehingga dapat dimulai pada awal tahun	Tingkatkan kinerja dan segera laksanakan kegiatan yang anggarannya bersumber dari DBHCHT setelah DPA ditetapkan agar target semester 1 bisa tercapai	Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan
12	UPT PUSKESMAS MEJOBBO	21,76	Tinggi	14,09	Rendah	DPA DBHCHT belum ditetapkan karena adanya perubahan regulasi sehingga kegiatan yang bersumber dari anggaran DBHCHT baru dilaksanakan pada Triwulan II	Penetapan anggaran termasuk DAK BOK non fisik yang bersamaan dengan APBD murni sehingga dapat di laksanakan di awal tahun	Tingkatkan kinerja dan segera laksanakan kegiatan yang anggaran bersumber dari DBHCHT setelah DPA ditetapkan agar target kinerja semester 1 dapat tercapai	Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan

13	UPT PUSKESMAS JEPANG	33,97	Sangat Tinggi	14,09	Rendah	DPA DBHCHT belum ditetapkan karena adanya perubahan regulasi sehingga kegiatan yang dibiayai DBHCHT baru dapat dilaksanakan Triwulan II	DAK Non Fisik ditetapkan bersamaan APBD murni sehingga bisa dimulai diawal tahun	Segera melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari anggaran DBHCHT setelah DPA ditetapkan sehingga target semester 1 dapat tercapai	Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan
14	UPT PUSKESMAS JEKULO	26,94	Sangat Tinggi	16,25	Rendah	DPA DBHCAT belum ditetapkan karena adanya perubahan regulasi sehingga kegiatan yang di biayai DBHCT baru dapat dilaksanakan Triwulan II	DAK Non Fisik ditetapkan bersamaan APBD sehingga bisa dimulai di awal Tahun.	Tingkatkan kinerja dan segera laksanakan kegiatan yang anggarannya bersumber dari DBHCHT setelah DPA ditetapkan agar target semester 1 bisa tercapai	Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan
15	UPT PUSKESMAS TANJUNGREJO	30,2	Sangat Tinggi	14	Rendah	DPA DBHCHT belum ditetapkan karena adanya perubahan regulasi sehingga kegiatan yang dibiayai DBHCHT baru dapat dilaksanakan Triwulan II	DAK Non Fisik ditetapkan bersamaan APBD murni sehingga bisa dimulai diawal tahun	Tingkatkan kinerja dan segera laksanakan kegiatan yang anggaran bersumber dari DBHCHT setelah DPA ditetapkan agar target kinerja semester 1 dapat tercapai	Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan

16	UPT PUSKESMAS BAE	18,6	Sedang	15,85	Rendah	DPA DBHCHT belum ditetapkan karena adanya perubahan regulasi sehingga kegiatan yang dibiayai DBHCHT baru dapat dilaksanakan Triwulan II	Tersedianya SDM yang Mencukupi, penetapan anggaran termasuk DAK awal tahun	Tingkatkan kinerja dalam pelayanan masyarakat dan segera laksanakan kegiatan-kegiatan yang didanai bersumber dari DBHCHT setelah DPA ditetapkan agar target kinerja dan anggaran semester 1 bisa tercapai	Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan
17	UPT PUSKESMAS DERSALAM	22,89	Tinggi	14,4	Rendah	DPA DBHCHT belum ditetapkan karena adanya perubahan regulasi sehingga kegiatan yang dibiayai DBHCHT baru dapat dilaksanakan Triwulan II	DAK Non Fisik ditetapkan bersamaan APBD murni sehingga bisa dimulai diawal tahun	Tingkatkan kinerja pelayanan masyarakat dan segera laksanakan kegiatan yang bersumber anggaran dari DBHCHT setelah DPA ditetapkan agar target kinerja dan anggaran semester 1 bisa tercapai	Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan
18	UPT PUSKESMAS GRIBIG	32,98	Sangat Tinggi	16,23	Rendah	DPA DBHCHT belum ditetapkan karena adanya perubahan regulasi sehingga kegiatan yg dibiayai DBHCHT baru dapat dilaksanakan Triwulan II.	DAK Non Fisik ditetapkan bersamaan APBD murni sehingga bisa dimulai diawal tahun.	Tingkatkan kinerja dan segera laksanakan kegiatan yang anggarannya bersumber dari DBHCHT setelah DPA ditetapkan agar target semester 1 bisa tercapai	Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan
19	UPT PUSKESMAS GONDOSARI	13,14	Rendah	12,08	Sangat Rendah	DPA DBHCHT belum ditetapkan karena adanya perubahan regulasi sehingga kegiatan yang dibiayai DBHCHT baru dapat dilaksanakan Triwulan II	DAK Non Fisik ditetapkan bersamaan APBD murni sehingga bisa dimulai diawal tahun	Tingkatkan kinerja dan segera laksanakan kegiatan yang bersumber dari anggaran DBHCHT agar target semester 1 dapat tercapai	Kegiatan yang telah direncanakan dilaksanakan sesuai target kinerja dan anggaran

20	UPT PUSKESMAS DAWE	23,72	Sangat Tinggi	15,84	Rendah	DPA DBHCHT belum ditetapkan karena adanya perubahan regulasi sehingga kegiatan yang dibiayai DBHCHT baru dapat dilaksanakan Triwulan II	<ul style="list-style-type: none"> - SDM sudah mencukupi - Sarana dan prasarana kesehatan cukup baik - DAK Non Fisik ditetapkan bersamaan APBD murni sehingga bisa dimulai diawal tahun 	Tingkatkan kinerja, tetap jalankan kegiatan sesuai protokol kesehatan dan segera laksanakan kegiatan yang dibiayai dari anggaran DBHCHT setelah DPA ditetapkan sehingga target semester 1 bisa tercapai	Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan
21	UPT PUSKESMAS REJOSARI	23,57	Sangat Tinggi	17,31	Sedang	DPA DBHCHT belum ditetapkan karena adanya perubahan regulasi sehingga kegiatan yang dibiayai DBHCHT baru bisa dilaksanakan pada Triwulan II	Anggaran DAK Non Fisik ditetapkan bersamaan APBD murni sehingga bisa dimulai diawal tahun	Tingkatkan kinerja dan segera laksanakan kegiatan yang anggarannya bersumber dari DBHCHT setelah DPA ditetapkan agar target semester 1 bisa tercapai	Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan
22	UPTD Laboratorium Kesehatan	4,52	Sangat Rendah	3,98	Sangat Rendah	Pelaksanaan kegiatan menunggu penetapan DPA DBHCHT	DPA Pajak Rokok sudah di tetapkan sehingga dapat berjalan dan terlaksana mulai akhir bulan Januari 2022	Realisasi masing sangat rendah sehingga perlu peningkatan kinerja dan segera laksanakan kegiatan yang anggarannya bersumber dari DBHCHT setelah DPA ditetapkan agar target semester 1 bisa tercapai	Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan

23	RSUD DR. LOEKMONO HADI	19,82	Tinggi	13,18	Rendah	Adanya regulasi perubahan peraturan pengadaan sehingga capaian realisasi pengadaan tidak memenuhi target	Inovasi pelayanan & promosi pelayanan Rumah Sakit dalam memenuhi pencapaian target kunjungan pasien pada Rawat Jalan dan Rawat Inap di RSUD dr. Loekmono Hadi	Kegiatan yang belum terealisasi di Triwulan I segera dilaksanakan di Triwulan II baik kinerja maupun keuangan agar target semester 1 dapat tercapai.	Pelaksanaan kegiatan dimulai diawal tahun anggaran
24	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	31,65	Sangat Tinggi	5,84	Sangat Rendah	Kegiatan yang bersifat kontraktual banyak yang masih dalam proses pengadaan lelang	Kerjasama yang solid antara pengelola kegiatan	Tingkatkan upaya pencapaian target dan realisasi anggaran di triwulan berikutnya. percepat proses pengadaan kegiatan-kegiatan fisik agar tidak mengalami keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	Perencanaan kegiatan di fokuskan pada pemenuhan infrastruktur dan peningkatan kualitas sarpras pelayanan publik utamanya menjaga kondisi jalan Kabupaten dalam keadaan baik. Upaya-upaya penanganan preventif terhadap bencana banjir.
25	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	37,26	Sangat Tinggi	22,72	Tinggi	Pada Triwulan I Kabupaten Kudus masih memasuki musim penghujan dengan intensitas tinggi, sehingga pelaksanaan kegiatan masih dalam tahap perencanaan dan koordinasi di tingkat intern.	Koordinasi intern dinas yang baik antar bidang.	Dari rata rata capaian kinerja Triwulan I menunjukkan sangat tinggi (37,26 %), sehingga bisa dilanjutkan untuk triwulan berikutnya	Pelaksanaan kegiatan memenuhi 4 kriteria yaitu: tepat waktu, tepat mutu,, tepat biaya dan tepat sasaran

26	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	46,43	Sangat Tinggi	16,09	Rendah	Masih kurangnya sarpras dan operasional pendukung pelaksanaan kegiatan yang belum memadai sehingga pelaksanaan kegiatan belum maksimal.	Arahan dari Pimpinan untuk selalu melaksanakan kegiatan sesuai dengan target perencanaan.	Maksimalkan sumber daya yang ada dengan efisiensi anggaran sehingga tercapai target kinerjanya, Capaian Realisasi kinerja ada yang melebihi 100% agar dipertahankan RKP disesuaikan indikatornya. Dengan dana yang terserap lebih rendah menandakan adanya efisiensi, pertahankan kedepannya.	Penentuan target sebaiknya diperhitungkan dalam pencapaiannya, agar hasil akhir dapat tercapai 100%.
27	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	15,85	Rendah	12,94	Sangat Rendah	Triwulan I bencana masih cukup tinggi, sehingga perencanaan kegiatan di Triwulan II	Kegiatan sudah sesuai dengan jadwal perencanaan, dan sebagian sesuai kebutuhan di lapangan	Perlunya peningkatan kinerja sehingga capaian fisik dan keuangan dapat maksimal	Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dan target yang telah ditentukan
28	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	17,54	Sedang	5,39	Sangat Rendah	Kekosongan Bendahara Pengeluaran (menunggu SK Bupati) dan kekosongan PPTK/Kabid Dalduk KB karena purna tugas	Anggaran bersumber dari DAK (Pergeseran I) mendorong peningkatan capaian kinerja dinas	Meningkatkan kinerja untuk mengejar target yang belum tercapai sehingga target kinerja dan target anggaran semester 1 dapat tercapai	Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja dan target anggaran yang telah ditetapkan

29	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	11,17	Sangat Rendah	2,06	Sangat Rendah	Alokasi dana DBHCHT Belum dapat dilaksanakan menunggu penyesuaian PMK 215/PMK.07/2021	Komitmen Pecepatan Realisasi Anggaran dan Kegiatan Tepat Waktu	Untuk rencana penggunaan dana DBHCHT telah keluar Berita Acaranya, sehingga Dinas Nakerinkop UKM bisa segera menyesuaikan dengan rencana Perubahan 2022	Tahun depan diusahakan ada jenis pelatihan yang bisa dikolaborasikan dengan OPD lain.
----	---	-------	---------------	------	---------------	---	--	---	---

30	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	35,83	Sangat Tinggi	23	Tinggi	Keterlambatan penetapan Pejabat Pengadaan untuk pengadaan secara elektronik karena menunggu setting user dari LKPP.	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan baik dari segi sarpras dan kepatuhan pelayanan berdasarkan SOP dan SP 1x24 jam. - Inovasi pelayanan administrasi kependudukan secara online melalui Layanan PAK SEMMOK - Peningkatan kapasitas SDM. - Peningkatan pemantauan dan evaluasi program, kegiatan, dan pelayanan langsung ke masyarakat berbasis TI - Pemberian reward and punishment pegawai. - Membuka akses Layanan Pengaduan dan Helpdesk Konsultasi. - Kolaborasi stakeholder Lintas Sektoral dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan - Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik 	Pelaksanaan kegiatan Triwulan I yang belum mencapai target kinerja dan keuangan agar segera ditingkatkan di Triwulan II dan kegiatan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang direncanakan untuk dipertahankan agar capaian target kinerja dan keuangan di Triwulan II dapat tercapai.	Kegiatan mulai dilaksanakan diawal tahun anggaran supaya target kinerja dan keuangan dapat tercapai.
----	--	-------	------------------	----	--------	---	---	--	--

31	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	17,03	Sedang	11,61	Sangat Rendah	Sebagian kegiatan pelaksanaan dimulai pada Triwulan II	Mengoptimalkan sumber daya manusia pegawai dan pagu anggaran yang ada untuk pelaksanaan program dan kegiatan demi tercapainya indikator kinerja	Tingkatkan capaian target triwulan berikut	Target mendatang diperhitungkan dengan seksama agar maksimal hasilnya
32	DINAS PERHUBUNGAN	19,11	Tinggi	14,07	Rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Lemahnya koordinasi antara perencanaan dan pelaksana anggaran akan menciptakan potensi angka penyerapan menjadi lebih rendah. - Satuan harga yang ditetapkan sering tidak sesuai kebutuhan riil (terjadi kenaikan harga di toko) 	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen bersama antar bidang untuk melakukan penyerapan anggaran kegiatan sesuai target yg ditetapkan. - Terjalin komunikasi yang baik antara bendahara pengeluaran dengan pembantu bendahara pengeluaran. 	Dari hasil laporan evaluasi, terlihat bahwa penyerapan anggaran di TW.I masih rendah, diperlukan upaya lebih intensif pada TW berikutnya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yg telah direncanakan dengan membuat target-target kerja yang lebih jelas dan detail	Fokus perencanaan di tahun mendatang dalam upaya pemenuhan infrastruktur keselamatan jalan yang memadai, pengelolaan manajemen penanganan LPJU yg lebih baik dan efisien, serta optimalisasi PAD melalui intensifikasi pendapatan dan perbaikan manajemen perparkiran

33	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	39,26	Sangat Tinggi	16,79	Rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Kelengkapan administrasi dari rekanan kurang tepat waktu dalam sub kegiatan pengelolaan pusat data - Pekerjaan audit aplikasi belum bisa dilaksanakan pada triwulan I dikarenakan untuk pelaksanaan audit aplikasi yang mendukung SPBE dalam hal ini pelaksanaan audit internal (yang dilakukan dari Pemerintah Daerah sendiri), sebelum pelaksanaan audit diharuskan memiliki SK Tim Audit Internal dan rencana audit sudah tercantum di dalam peta rencana SPBE untuk mendapatkan akses ke aplikasi tools audit BPPT. Oleh karena Kabupaten Kudus belum membentuk tim audit internal dan belum memiliki peta rencana maka audit aplikasi belum bisa dilaksanakan. - Dalam sub kegiatan pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik, pekerjaan penyusunan arsitektur dan peta nasional. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan statistik yaitu dikarenakan daftar data perangkat daerah belum tersusun maka proses 	Ketersediaan sumber daya pendukung kegiatan	Diakselerasi (dipercepat) capaian subgiat yang urusan, karena beberapa masih sangat kecil capaiannya antara lain : kemitraan,pengelolaan pusat data, pengembgn aplikasi, koord n sinkronisasi, sdm statistik, keamanan informasi.	Indikator dan target di beberapa subgiat perlu dicermati lagi utamanya hasil giat sub giat harus mendukung capaian IKU bupati dan merupakan amanat kinerja urusan Kominfo
----	----------------------------------	-------	---------------	-------	--------	--	---	---	---

					<p>pengumpulan data statistik sektoral masih mengacu pada daftar data Kudus Dalam Angka. (Catatan : Daftar data akan dibahas dalam forum data. Forum data menunggu penetapan SK forum data dari Bupati)</p> <ul style="list-style-type: none">- Rencana SPBE masih dalam proses koordinasi dikarenakan arsitektur SPBE nasional belum ada. Penyusunan dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE akan dilaksanakan setelah terlaksananya asistensi / pendampingan penerapan SPBE dari KEMENPANRB pada bulan April 2022 agar arsitektur dan peta rencana yang disusun nantinya tidak melenceng dari konsep arsitektur SPBE			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

34	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	19,88	Tinggi	12,1	Sangat Rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem OSS belum bisa menyajikan data perusahaan yang wajib dipantau, - Sistem LKPM sulit diakses dan terbatas waktu sehingga realisasi belum dilaporkan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas pelayanan Perizinan baik dari segi Sarpras dan kepatuhan pelayanan berdasarkan SOP dan SP Inovasi pelayanan Perizinan secara online melalui OSS - Peningkatan kapasitas SDM; - Peningkatan pemantauan dan evaluasi program, kegiatan, dan pelayanan langsung ke masyarakat berbasis TI; - Pemberian reward and punishment pegawai; - Membuka akses Layanan Pengaduan dan Helpdesk Konsultasi; - Kolaborasi stakeholder Lintas Sektoral dalam pelayanan penerbitan kan; - Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perizinan. 	<p>Kategori pencapaian realisasi indikator kinerja sudah tinggi diikuti oleh pencapaian realisasi keuangan sangat rendah, perlu didorong keselarasan capaian realisasinya, Jika memang terjadi efisiensi anggaran pada sub kegiatan yang sudah terjadi, maka anggaran tersisa dapat digeser untuk mengoptimalkan capaian indikator yang masih rendah. 2. Mengawal Kegiatan/ SUB Kegiatan yang capaian indikatornya masih 0, untuk didorong pencapaian kinerja pada triwulan berikutnya.</p>	<p>1. Lebih mencermati kembali rincian anggaran belanja dan anggaran kas agar dapat lebih selaras dengan target indikator. 2. memastikan bahwa target indikator sub kegiatan dan kegiatan pada tahun berikutnya dapat membantu pencapaian indikator capaian program pada Renstra OPD</p>
----	--	-------	--------	------	---------------	--	--	---	--

35	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	12,89	Sangat Rendah	14,78	Rendah	adanya proses pengadaan barang jasa yang harus melalui LPSE Adanya jadwal kegiatan yang berkaitan dengan pihak luar	Kecepatan penatausahaan SPJ sehingga mempermudah pengajuan GU yang pada akhirnya selalu ada dana pada bendahara pengeluaran. Terlaksananya kolaborasi, koordinasi antar bidang sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan baik	Dengan meredanya pandemi Covid 19, kami harapkan Dinas Budpar dapat lebih meningkatkan kualitas obyek wisata dan mutu pelayanan pada wisatawan sehingga dapat berimbas positif pada penerimaan PAD yang bersumber dari sektor pariwisata.	Untuk tahun depan, fokus pada pengembangan ekonomi kreatif harus lebih dintensifkan, agar Kab. Kudus mampu menjadi Kota Kreatif seperti beberapa kota lain di Jawa Tengah yang telah memperoleh predikat tersebut.
36	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	46,74	Sangat Tinggi	16,97	Rendah	Penetapan target kinerja ada yang terlalu tinggi dan terlalu rendah, sehingga untuk indikator yang terlalu tinggi akan sulit dalam pencapaian, sedangkan target terlalu rendah sehingga capaian melampaui target meskipun baru pada triwulan I	Seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja pada triwulan I tahun 2022, beberapa sub kegiatan mencapai lebih dari 100 % yaitu Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan literasi berbais inklusi sosial. Dan beberapa sub kegiatan belum mencapai target yang ditetapkan.	Peningkatan kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan	Dicermati dan disesuaikan agar tidak terulang lagi pada tahun berikutnya.

37	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	11,41	Sangat Rendah	6,66	Sangat Rendah	Kendala masih kecilnya capaian fisik maupun kuangan dikarenakan Juknis DAK yang terbit terlambat dan kebanyakan kegiatan fisik yang masih dalam tahap perencanaan	Adanya komitmen pimpinan untuk segera melaksanakan kegiatan dan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait	Penyerapan lebih ditingkatkan karena realisasi di tw 1 ini masih rendah, sehingga diharapkan tw berikutnya capaian kinerja dapat sesuai target	Regulasi dan dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan supaya dipersiapkan lebih awal serta ditingkatkan koordinasi dengan pihak terkait sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal (perencanaan)
38	DINAS PERDAGANGAN	28,28	Sangat Tinggi	14,74	Rendah	SSH pengadaan truk yang tidak sesuai dengan sistem pengadaan dan sulitnya akses sistem RUP dan LPSE	Komitmen terhadap target kinerja	Sesuaikan SSH pengadaan truk dengan cara pergeseran obyek belanja	Buat perencanaan sesuai SSH 2023

39	BAGIAN PEMERINTAHAN	45,81	Sangat Tinggi	11,27	Sangat Rendah	Belum disusunnya petunjuk teknis pelaksanaan di tingkat lokal	Kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku	secara umum kinerja fisik sudah sangat tinggi, tetap dipertahankan. Namun jika dipahami tiap subkegiatan terdapat target capaian yang kurang logis mengakibatkan capaian yang kurang logis pula.	Agar diperbaiki penentuan target capaian karena beberapa subgiat capaian di triwulan 1 sangat tinggi dan kurang logis misalkan penataan administrasi (fasilitasi kecamatan) sudah 100 % di triwulan 1
40	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	29,14	Sangat Tinggi	9,02	Sangat Rendah	Keterbatasan jumlah SDM dan situasi pandemi Covid-19 maka kegiatan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus dilaksanakan dengan kapasitas terbatas atau tidak maksimal	Kebersamaan dan Kekompakan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus	Kategori kinerja sangat tinggi namun kontribusi berasal dari kegiatan rutin (program penunjang internal bagian). Agar dilakukan percepatan capaian kinerja program yang berorientasi pada masyarakat	Dicermati lagi penetapan target dan indikator pada subgiat-giat-dan atau program

41	BAGIAN HUKUM	44,05	Sangat Tinggi	15,4	Rendah	Pelaksanaan kegiatan cetak dan penggandaan Himpunan Produk Hukum Daerah masih dalam proses penyusunan, sehingga masih tertunda dalam penyebarluasan informasi hukum.	Telah melaksanakan sebagian kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.	Kategori kinerja sangat tinggi, namun hasil merupakan kontribusi atas subgiat rutin. Mohon untuk subgiat khusus (hanya dilakukan oleh bag. Hukum) diakselerasi pencapaiannya.	Penentuan target dalam subgiat dan rumus penghitungannya dicermati lagi agar capaian logis. Beberapa subgiat sudah tercapai 100% pada triwulan I, padahal subgiat rutin pemenuhan kebutuhan unit dalam 1 tahun.
42	BAGIAN PEREKONOMIAN	39,82	Sangat Tinggi	0,38	Sangat Rendah	Sebagian kegiatan yang anggarannya bersumber dari DBHCHT belum bisa berjalan karena adanya perubahan regulasi tentang penggunaan DBHCHT setelah anggaran ditetapkan.	Kegiatan yang merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.	Harap memantau perkembangan regulasi DBHCHT untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan giat DBHCHT dan tetap berkoordinasi intensif dengan Bappeda untuk perencanaannya.	sesuai regulasi dan perkembangan terakhir, DBHCHT yang bantuan sosial direncanakan dilaksanakan di Dinsos P2AP#KB

43	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	44,39	Sangat Tinggi	13,41	Rendah	Kegiatan perjalanan dinas di sub kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan belum dapat dilaksanakan karena belum ada undangan	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dijadwalkan	kategori capaian sangat tinggi namun jika dicermati, merupakan sub kegiatan rutin antara lain penyediaan gaji. Untuk subkegiatan yang merupakan tugas fungsi fasilitasi penyusunan program belum dilaksanakan.	Penajaman tugas fungsi bagian administrasi pembangunan sehingga tidak berkesan tumpang tindih dengan Bappeda dalam hal perencanaan pembangunan.
44	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	36,01	Sangat Tinggi	13,59	Rendah	Pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa dari Perangkat daerah sebagian besar belum dilaksanakan, sehingga fasilitasi proses pemilihan penyedia belum dapat dilaksanakan	- Sebagian besar kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan kesekretariatan yang merupakan kegiatan rutin penunjang urusan pemeritahan - Kerjasama antar personil dalam unit kerja berjalan efektif dan komitmen untuk melaksanakan tugas dengan baik	Mohon untuk percepatan pengadaan barang jasa pemerintah, dilakukan upaya "jemput bola" ke PD yang lelang agar segera mengirmlan dokumen-dokumen kelengkapan pengadaannya sehingga PBJ segera dapat melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa.	Agar diantisipasi dengan intensifikasi koordinasi dengan PD sebelum TA anggaran berjalan

45	BAGIAN UMUM	52,19	Sangat Tinggi	16,14	Rendah	- Pengaturan cashflow yang kurang optimal, sehingga banyak belanja yang tidak bisa teralisasi tepat waktu. - Keterlambatan pencairan UP - Belum optimalnya kegiatan fasilitasi penyediaan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah	- Ketersediaan SDM yang handal, sehingga dapat mengejar target semaksimal mungkin - Koordinasi yang baik antar para pelaksana kegiatan	Kategori capaian sangat tinggi dipertahankan. Namun ada beberapa subgiat yang capaian sudah 100%, hal ini kurang logis. Permasalahan subgiat fasilitasi kerumahtanggaan, direvisi karena kontradiksi dengan capaian yang sudah 100%.	Penentuan indikator dan penetapan target dicermati kembali. Agar lebih berorientasi hasil untuk mencapai IKU PD dan pada akhirnya pencapaian IKU Bupati
46	BAGIAN ORGANISASI	34,87	Sangat Tinggi	13,03	Rendah	Kegiatan yang belum terlaksana adalah Kegiatan Rutin sehingga mempengaruhi capaian realisasi Perangkat Daerah	Capaian dapat dicapai sesuai target dikarenakan kegiatan pada masing-masing Sub Koordinator telah berjalan	capaian sangat tinggi untuk dipertahankan. Semua subgiat dan giat di Bagor adalah fungsi penunjang urusan pemerintahan sehingga tugas fungsi keorganisasian teranggarkan di program penunjang urusan pemerintahan	Hasil kegiatan/outcome dikawal agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kebijakan2 yang dihasilkan oleh Sekda dan atau Bupati dapat diimplementasikan.

47	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	27,5	Sangat Tinggi	16,04	Rendah	Kondisi pandemi covid_19 yang masih membatasi koordinasi dan konsultasi serta perencanaan kegiatan yang belum sesuai kebutuhan riil.	Kerjasama yang solid antara perencanaan, pengelola kegiatan dan penatausahaan keuangan sehingga dapat terealisasi sesuai target, dan walapun masa pandemi covid-19 koordinasi dan konsultasi masih dilaksanakan baik secara offline maupun online, fasilitasi keprotokolan serta up to date dalam publikasi tugas pimpinan.	kategori Kinerja sangat baik dipertahankan. Namun perlu dicermati berkaitan dengan target indikator giat dan subgiat sehingga capaian logis. Ada 1 giat yang di TW 1 sdh tercapai 100% hal ini kurang logis.	Disesuaikan dalam penentuan target dan indikator subgiat, giat dan program
48	SEKRETARIAT DPRD	23,32	Sangat Tinggi	14,12	Rendah	Pencapaian target kinerja dan anggaran menyinkronkan agenda kegiatan DPRD yang mengalami dinamika	Pencapaian target kinerja dan anggaran didukung kerjasama dan koordinasi antar bagian	pertahankan capaian sesuai dengan rencana kerja	pertimbangkan target sesuai dengan perkiraan tahun mendatang

49	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	45,97	Sangat Tinggi	14,27	Rendah	Dokumen perencanaan belum sesuai dengan jadwal perencanaan yang ditetapkan; Masih masa pandemi, kegiatan tidak dilaksanakan secara tatap muka tetapi dilaksanakan secara daring dan hybrid; Penginputan terhambat Standar Harga Satuan yang perlu dimutakhirkan; Belum adanya Permendagri tentang Pedoman Penyusunan RKPD 2023	Adanya tenaga ahli yang membantu dalam proses penelaahan dokumen perencanaan; Adanya SIPD mempermudah dalam penyiapan bahan Konsultasi Publik dan Forum OPD, penyiapan bahan Musrenbang, penyiapan bahan Musrenbang Kecamatan dan penyiapan dokumen perencanaan; adanya penyempurnaan sistem e planning dalam kegiatan evaluasi perencanaan.	Tingkat Capaian Kinerja sudah sangat tinggi namun realisasi anggaran dalam renja masih rendah, menandakan masih terdapat anggaran yang belum bisa dicairkan pada akhir triwulan 1, serta proses pelaksanaan Musrenbang yang dilaksanakan secara daring dan kurangnya kehadiran peserta musrenbang mengakibatkan tidak terserapnya realisasi anggaran. Capaian Kinerja yang sudah 100% namun realiasi anggaran masih rendah, diharapkan dapat di geser di anggaran perubahan anggaran.	Untuk pelaksanaan pada tahun berikutnya, Perangkat Daerah diharapkan untuk lebih memperhatikan capaian indikator dan realisasi anggaran tiap triwulan, agar antara capaian kinerja dengan capaian realisasi dapat memproleh hasil sangat baik.
----	---	-------	---------------	-------	--------	--	--	---	--

50	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	19,25	Tinggi	16,87	Rendah	Pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan pentahapan, koordinasi dan konsultasi	Adanya amanat Perundang-undangan dalam pelaksanaan kegiatan	Tingkat Capaian Kinerja sudah tinggi namun realisasi anggaran dalam renja masih rendah, menandakan masih terdapat anggaran yang belum terserap pada akhir triwulan 1. Untuk mengoptimalkan Capaian Kinerja yang sudah melibihi target namun realiasi anggaran masih rendah diharapkan dapat di geser pada perubahan anggaran ataupun dapat didorong target realisasi anggaran per triwulannya.	Untuk pelaksanaan pada tahun berikutnya, Perangkat Daerah diharapkan untuk lebih memperhatikan capaian indikator dan realisasi anggaran tiap triwulan, agar antara capaian kinerja dengan capaian realisasi dapat memeproleh hasil sangat baik.
51	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	15,1	Rendah	8,87	Sangat Rendah	Dukungan aplikasi belum dibarengi dengan penggunaan yang maksimal menjadikan pelayanan kepegawaian kurang cepat	BKPP dalam melaksanakan tugasnya didukung dengan petunjuk pelaksanaan dan tambahan sistem aplikasi kepegawaian sehingga mempercepat pelayanan	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Triwulan I tergolong rendah, sehingga BKPP di harapkan untuk bisa melaksanakan kegiatan sesuai schedulanya yang salah satunya tercantum di RAK.	Diharapkan BKPP mampu memanfaatkan sitem aplikasi kepegawaian yang sudah ada secara maksimal.

52	INSPEKTORAT DAERAH	24,15	Sangat Tinggi	12,73	Sangat Rendah	PPTK tidak mempedomani Renaksi & banyak penugasan di luar Renaksi	1. Renaksi disusun secara detail 2. Penyusunan PKPT dilakukan di N-1 dan Pelaksanaan di lakukan diawal Tahun. 3. Pelaksanaan Rapat Staff dilakukan setiap Bulan 4. Pelaksanaan PKS (Pelatihan Kanto Sendiri) dilkukan untuk Sosialisasi, Komunikasi dan Tranferolid	Memberi masukan kepada PPTK agar penugasan sesuai renaksi yang telah direncanakan.	Mencermati capaian yang melebihi 100%, untuk dipertimbangkan penentuan target capaian atau reformulasi penghitungan
----	--------------------	-------	---------------	-------	---------------	---	--	--	---

53	KECAMATAN KALIWUNGU	29,97	Sangat Tinggi	14,83	Rendah	kemampuan dan tingkat pendidikan aparatur desa sangat bervariasi diantara 15 desa di Kecamatan Kaliwungu. kecepatan serta akselerasi kinerja antara satu desa dengan desa yang lain perlu disesuaikan dengan standar baku minimal agar dapat berjalan dengan selaras dan sinergis dalam satu kecamatan Kaliwungu. .	seiring dengan kegiatan vaksinasi yang konsisten dilakukan oleh jajaran Kecamatan Kaliwungu menjadikan tingginya immunitas masyarakat kecamatan Kaliwungu, sehingga lambat laun kegiatan baik perekonomian maupun sosial bergerak kembali. hal ini juga berimbas positif dengan kegiatan- kegiatan yang dilakukan di tingkat desa, sehingga perkembangan dan aktivitas lambat laun mengarah pada normal baru.	pertahankan capaian target kinerja yang tinggi di triwulan berikut	pertimbangkan dengan masak penentuan target di masa mendatang dan disesuaikan perkiraan kondisi pada saat itu
54	KECAMATAN KOTA KUDUS	29,41	Sangat Tinggi	8,28	Sangat Rendah	Kegiatan pemberdayaan kelurahan Dalam Proses Penyusunan Kerangka Acuan Kerja mengingat SK Pejabat Pembuat Komitmen tertanggal 1 Maret 2022	Tersedianya anggaran dan perencanaan yang baik	pertahankan capaian target kinerja sesuai dengan jadwaln kegiatan	pertimbangkan dengan baik penentuan target sesuaikan dengan kondisi mendatang

55	KELURAHAN PURWOSARI	35,44	Sangat Tinggi	11,1	Sangat Rendah	perubahan alur penatausahaan keuangan	penyederhanaan sistem penatausahaan keuangan dilingkungan Kelurahan yang menginduk ke Kecamatan Kota	Tingkatkan kinerja ditriwulan berikutnya	Pastikan target kinerja disesuaikan dengan kondisi yang akan terjadi
56	KELURAHAN SUNGGINGAN	33,54	Sangat Tinggi	10,64	Sangat Rendah	- Perubahan Regulasi dalam pencairan anggaran (UP/GU) kegiatan dan besaran Uang persediaan - Adanya perubahan aturan dalam pencairan TPP sehingga belum bisa terlaksana - Beberapa Ketua RT, RW, KST dan Linmas mempunyai kegiatan/kesibukan di luar, sehingga kegiatan Pembinaan/sosialisasi tidak dapat terlaksana secara maksimal	Adanya kerjasama yang baik antar pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan di wilayah Kelurahan dan Kecamatan Kota, serta situasi dan kondisi lingkungan yang mendukung	pertahankan capaian target kinerja sesuai jadwal kegiatan, namun perlu adanya sinkronisasi serapan anggaran krn terlihat masih rendah	petimbangkan dengan masak penentuan targete kinerja sesuai dengan kondisi mendatang
57	KELURAHAN PANJUNAN	21,34	Tinggi	10,8	Sangat Rendah	- Kurangnya permodalan sehingga setelah mengikuti pelatihan ada yang tidak bisa diterapkan ilmunya dalam pengembangan usahanya - Masih musim penghujan sehingga pelaksanaan fisik belum bisa dilaksanakan	- Antusias warga dalam mengikuti semua kegiatan Pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan usahanya	pertahankan capaian yang tinggi di triwulan berikut, nmaun perlu sinkronisasi pada penyerapan anggarannya	sebaiknya diperhitungkan sedemikian disesuaikan dengan kondisi mendatang

58	KELURAHAN WERGU WETAN	31,99	Sangat Tinggi	11,99	Sangat Rendah	- Perubahan Regulasi dalam pencairan GU kegiatan dan besaran Uang persediaan - Berperka Ketua RT , RW, KST dan Linmas mempunyai kegiatan/kesibukan di luar, sehingga kegiatan Pembinaan/sosialisasi tidak dapat diikuti secara maksimal	- Pelaksana kegiatan selalu proaktif konsultasi dengan OPD Induk dan Pengampu - Sebagian besar ketua RT dan RW antusias tinggi mengikuti pembinaan guna bekal sosilaisasi di masyarakat - PPTK kegiatan fisik proaktif minta masukan dari dinas teknis terkait.	Pertahan capaian target yg sesuai jadwal pd triwulan berikutnya namun perlu sinkronisasi pd serapan anggarannya	Pertimbangkan penentuan target dimasa mendatang dengan matang
59	KELURAHAN WERGU KULON	31,49	Sangat Tinggi	11,01	Sangat Rendah	Ada beberapa belanja yang tidak terealisasi keuangannya sesuai target karena : 1. realisasi harga yang lebih rendah dari indeks harga yang tersedia ; 2. belanja gaji kurang dari target karena ada ASN yang pensiun ; 3. belanja pemeliharaan/service kendaraan dinas belum terealisasi karena masih layak kondisinya ; 4. beberapa kegiatan belum terlaksana karena belum dapat menentukan waktu yang sesuai ; 5. belanja konsutansi perencanaan belum terealisasi karena AHSP dari Dinas PUPR belum selesai.	Adanya kerjasama yang baik antar pihak terkait di wilayah Kecamatan dan Kelurahan, serta situasi dan kondisi yang mendukung	pertahankan capaian yang tinggi ditriwulan berikut	agar target diperkirakan sedemikian rupa disesuaikan dengan kondisi mendatang

60	KELURAHAN MLATI KIDUL	35,82	Sangat Tinggi	11,87	Sangat Rendah	1. Adanya Perubahan aturan terkait penatausahaan keuangan yang menginduk di Kecamatan 2. Beberapa belanja belum terealisasi karena belum dibutuhkan (Service Kendaraan dan Peralatan Mesin Kantor) 3. Konsultan Perencana masih proses karena menunggu AHSP dari Dinas PUPR	Peran aktif masyarakat, Kerjasama Personil Kelurahan yang baik dan situasi kondisi yang memungkinkan	pertahankan capaian sesuai target di triwulan berikut	pertimbangan dengan baik penentu target di tahun mendatang disesuaikan dengan kondisi
61	KELURAHAN MLATINOROWITO	20,64	Tinggi	9,83	Sangat Rendah	perencanaan yang tidak baik dan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam melaksanakan suatu kegiatan sehingga kegiatan tersebut tidak bisa berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang ada.	Adanya Koordinasi dan Perencanaan yang baik serta pelaksanaan yang tepat sesuai dengan perencanaan yang telah di tentukan dan di dukung dengan dana yang tersedia untuk melaksanakan suatu kegiatan yang telah direncanakan.	pertahankan capaian kinerja sesuai dengan jadwal, namun perlu sinkronisasi penyerapan anggarannya	pertimbangkan dengan masak atas penentuan target di masa mendatang
62	KELURAHAN KERJASAN	49,65	Sangat Tinggi	22,57	Tinggi	Sistem Penatausahaan keuangan sentral di OPD sehingga dalam pengajuan anggaran disesuaikan kemampuan keuangan/anggaran serta kelengkapan dokumen pengadaan	Pengesahan DPA yang sesuai waktu yang ditentukan , Koordinasi antar seksi dan bidang perencanaan dan anggaran serta administrasi dan penatausahaan keuangan yang baik	Pertahankan capaian target sesuai jadwal kegiatan	Perhatikan target kinerja sesuai dengan kondisi th mendatang

63	KELURAHAN KAJEKSAN	35,27	Sangat Tinggi	9,3	Sangat Rendah	ada beberapa belanja yang tidak terealisasi keuangannya sesuai target karena : 1. salah dalam membuat target anggaran kas 2. ada beberapa kegiatan belum terlaksana karena menunggu waktu yang tepat	adanya kerjasama yang baik antar pihak terkait di wilayah kelurahan dan kecamatan	pertahankan capaian kinerja sesuai dengan rencana kerja	pertimbangkan penentuan target kinerja sesuai dengan kondisi mendatang
64	KECAMATAN JATI	27,73	Sangat Tinggi	13,61	Rendah	ada sebagian kegiatan yg dilaksanakan pada semester 3 karena kegiatan tersebut tergantung dengan jadwal dari Kabupaten seperti MTQ, Karnaval Budaya dan pameran pembangunan	kegiatan yang sudah ditargetkan sampai dengan triwulan pertama sebagian besar sudah terlaksana sesuai target	Pertahankan utk periode triwulan selanjutnya	Pertimbangkan dengan masak capaian target di th mendatang dgn baik
65	KECAMATAN UNDAAN	52,54	Sangat Tinggi	15,83	Rendah	adanya refocusing anggaran	Adanya solidaritas serta meningkatnya koordinasi antar bidang seksi sehingga diharapkan berpengaruh pada peningkatan pada capaian kinerja Kantor Kecamatan Undaan pada triwulan berikutnya di triwulan II	pertahankan capaian target sesuai dengan rencana kegiatan, namun perlu sinkronisasi pada serapan anggarannya	pertimbangkn dnegan masak target di tahun mendatang, sesuaikan dengan perkiraan kondisi pada saat itu
66	KECAMATAN MEJOBBO	30,03	Sangat Tinggi	14,39	Rendah	Kesalahan dalam pengaturan Reencana Anggaran Kas sehingga berpengaruh terhadap realisasi anggaran (administrasi keuangan tidak sesuai jadwal)	Adanya kerjasama yang baik antar seksi di kecamatan Mejobo serta situasi dan kondisi yang mendukung	Pertahankan capaian dintriwulan berikut	Perrimbangan dgn matang penetapan raget kinerja dimasa mendatang

67	KECAMATAN JEKULO	22,21	Tinggi	16,15	Rendah	Fungsi Kecamatan sebagai Fasilitas menyebabkan sebagian Sub Kegiatan dalam capaian kinerja dan serapan anggaran tergantung dengan OPD Lain	Maksimalnya penggunaan SDM dan Adanya Inovasi berbasis IT di tingkat Kabupaten membuat pencapaian target kinerja semakin terukur dan mudah	pertahankan capaian target sesuai dengan jadwal kegiatan	pertimbangkan dengan masak perkiraan target di tahun mendatang sesuai dengan kondisi pada saat itu
68	KECAMATAN BAE	37,35	Sangat Tinggi	15,8	Rendah	Kesalahan dalam pengaturan Rencana Anggaran Kas sehingga berpengaruh terhadap Realisasi Anggaran (administrasi keuangan belum sesuai jadwal)	Kegiatan sudah sesuai jadwal kegiatan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	pertahankan capaian target sesuai dengan jadwal rencana kerja namun perlu sinkronisasi dengan serapan anggarannya	pertimbangan sebaik mungkin penentuan target kinerja mendatang
69	KECAMATAN GEBOG	44,14	Sangat Tinggi	14,3	Rendah	Kurangnya koordinasi antar OPD	Merupakan kegiatan prioritas sehingga pelaksanaannya harus sesuai target	pertahankan capaian kinerja sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan, namun perlu diperhatikan serapan anggarannya juga	perimbangkan dengan masak penentuan target pada masa mendatang
70	KECAMATAN DAWE	25,61	Sangat Tinggi	15,36	Rendah	Pelaksanaan kegiatan tidak maksimal dikarenakan adanya revocusing anggaran	memaksimalkan kegiatan dan anggaran yang ada dengan memacu para seksi untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana kegiatan	pertahankan capaian kinerja yang tinggi di triwulan berikutnya, namun perlu penyesuaian di serapan anggarannya	pertimbangkan sebaik mungkin penentuan target kinerja di masa mendatang

71	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	32,69	Sangat Tinggi	6,33	Sangat Rendah	<p>1. Keterlambatan jadwal kegiatan dari pengusul kegiatan. 2. Rakor FKDM baru dilaksanakan 2 kali dari 3 kali Rakor yang seharusnya dilaksanakan. 3. Rakor TKPD dan TTPKS juga belum bisa dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah direncanakan karena berbenturan dengan agenda anggota Forkopimda. 4. Honor anggota FKDM, TKPD dan TTPKS baru dibayarkan karena mengikuti jadwal Rakor yang belum bisa dilaksanakan.</p>	<p>1. Sub-sub kegiatan dapat dilaksanakan sesuai time line yang sudah disusun. 2. Memaksimalkan potensi SDM yang ada. 3. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan. 4. Meningkatkan koordinasi intern dengan semua pemangku kepentingan. 5. Memaksimalkan penggunaan website dan media sosial untuk menyampaikan program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sekaligus menerima masukan- masukan untuk perbaikan.</p>	<p>Penetapan target pada masing-masing Triwulan agar benar- benar dihitung, disinergikan antara pagu dan jadwal pelaksanaannya, sehingga target kinerja pada masing-masing Triwulan nantinya dapat tercapai.</p>	<p>Adanya perubahan Renstra OPD agar target indikator juga disesuaikan, baik indikator program, indikator kegiatan dan indikator sub kegiatan.</p>
----	------------------------------------	-------	---------------	------	---------------	--	---	--	--

BAB VI
PENUTUP

Dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 disusun sebagai laporan pelaksanaan RKPD dan APBD tahun 2022 untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perubahan RKPD tahun 2022 yang menjadi pedoman penyusunan KUA PPAS Perubahan tahun 2022.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi program daerah, regional dan nasional maka dalam pelaksanaan RKPD perlu komitmen eksekutif dan legislatif, sehingga dalam pembahasan KUA PPAS dan APBD, tetap berpedoman pada RKPD.

Kudus, April 2022

Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
Sekretaris,

ARIF SUWANTO, S.Sos. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19720228 199903 1 005